



EVALUASI PELAKSANAAN **REFORMASI BIROKRASI** KEMENDIKBUD TAHUN 2017

Keunggulan.....

1

Telah dilakukannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama

Assesment terhadap pegawai telah menghasilkan cluster kapasitas pegawai

4

2

Penggunaan *e-government* telah dilakukan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan

Tingkat kematangan APIP pada Itjen telah mencapai level 3 berdasarkan hasil penilaian dari BPKP

5

3

Telah dilakukan evaluasi organisasi

Telah dibangun zona integritas terutama untuk unit-unit yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat

6

CATATAN

1

Belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan agen perubahan sebagai upaya untuk melakukan perubahan mind set aparatur

2

Pelaksanaan reformasi Birokrasi lebih dapat dirasakan di kantor pusat, sementara di Unit Kerja dan Satker masih bersifat formalitas

3

Evaluasi atas organisasi belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang seharusnya

4

Peta bisnis proses antar unit organisasi belum terbangun dengan baik

5

Reviu proses penyusunan peraturan perundang-undangan

6

Penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi

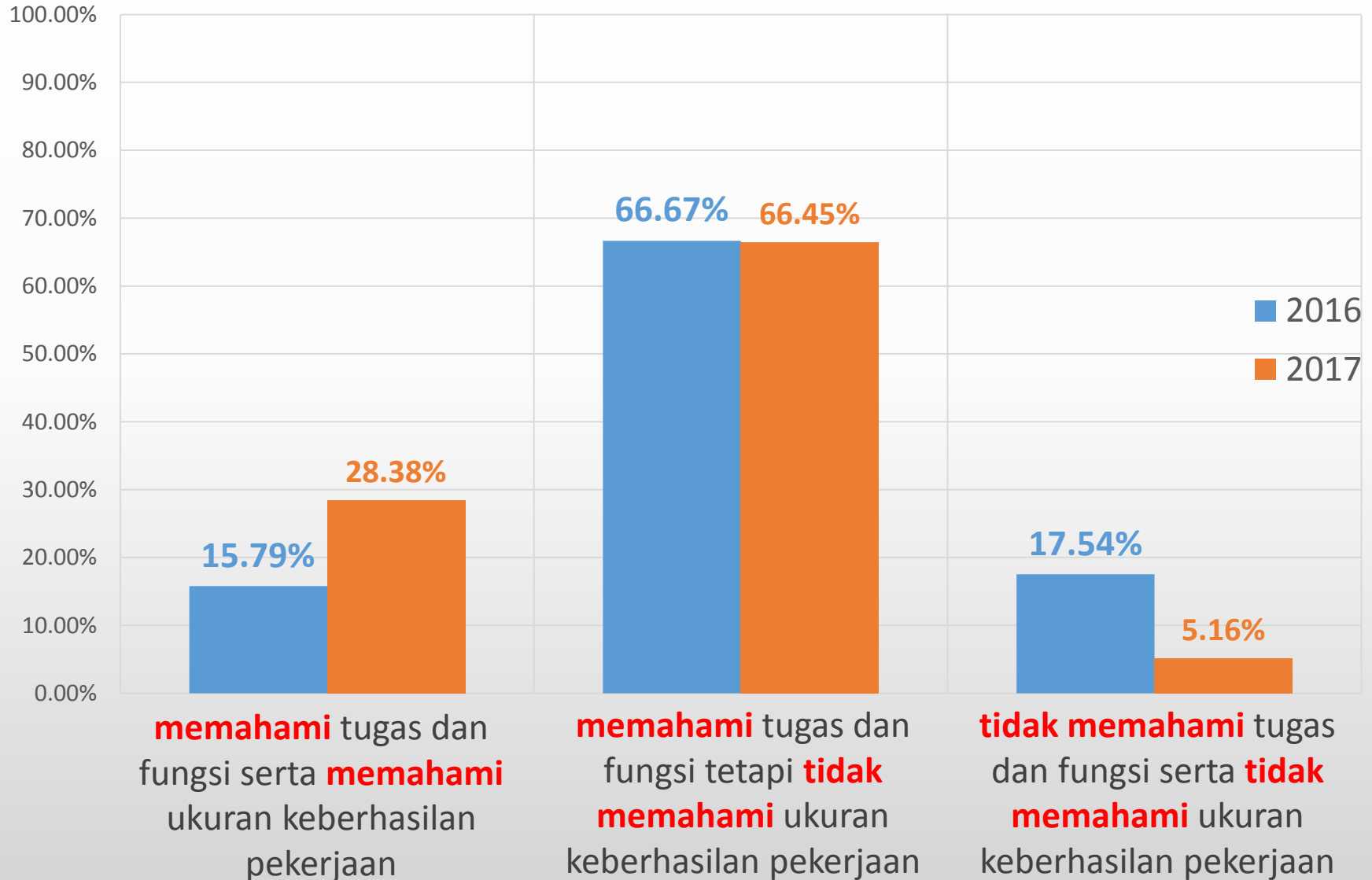
7

Pelaksanaan diklat (pengembangan kompetensi) secara berkelanjutan belum sepenuhnya berjalan baik

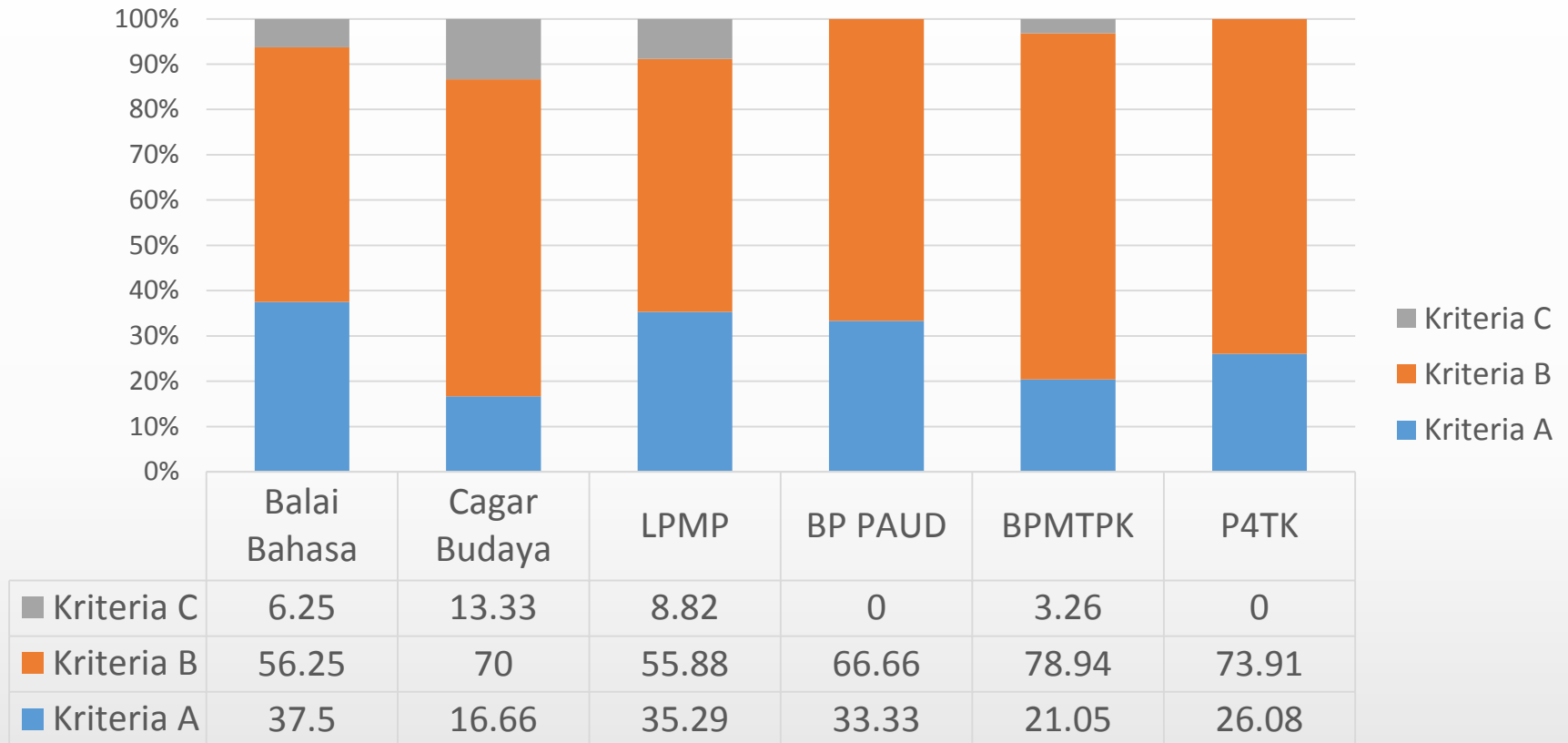
8

Pelaksanaan pengendalian internal (pengawasan dari atasan, mitigasi risiko, benturan kepentingan) di Satker belum berjalan baik

Survei Integritas Jabatan



Survei Integritas Jabatan

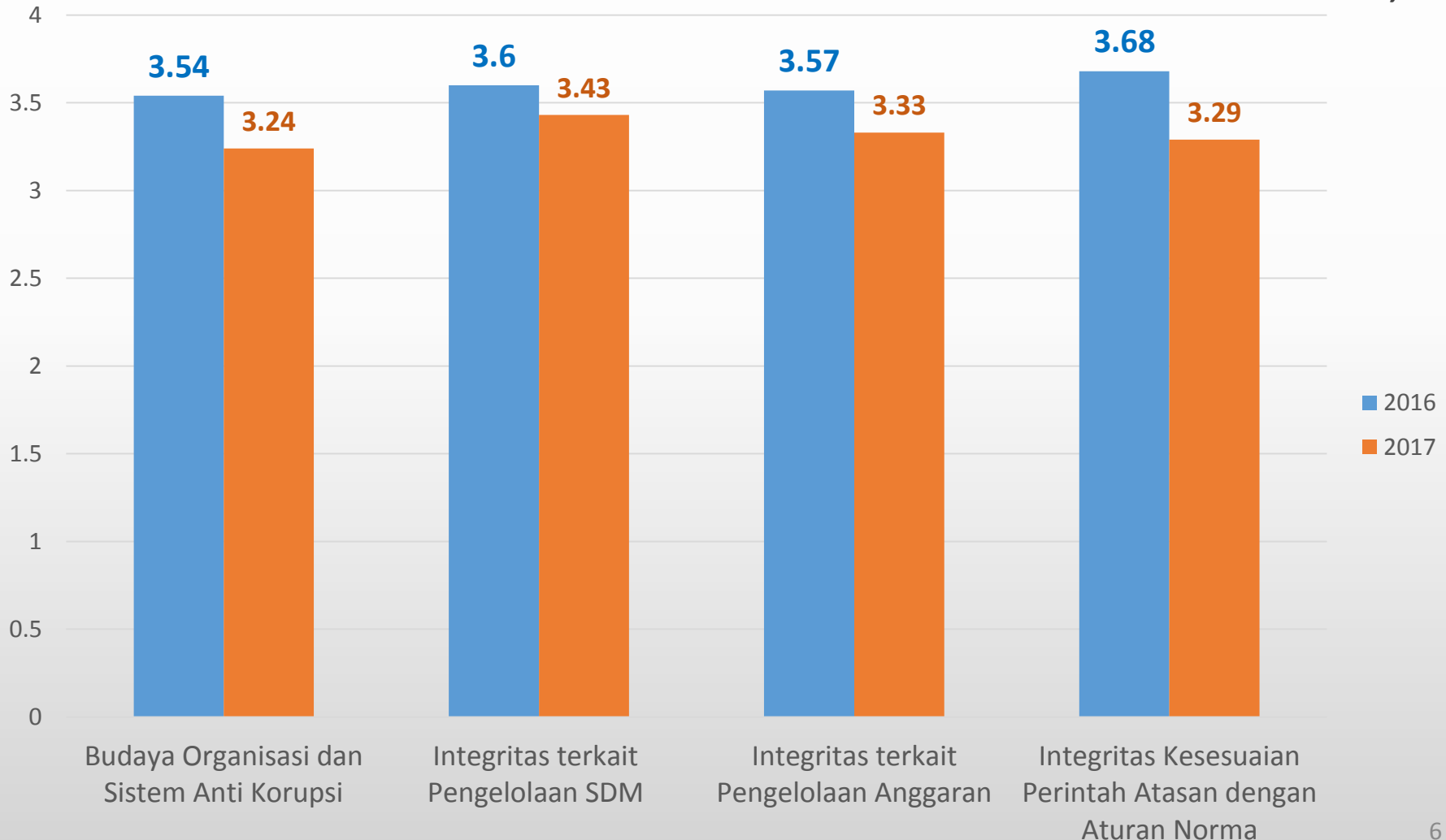


- A **Memahami** tugas dan fungsi serta **memahami** ukuran keberhasilan pekerjaan
- B **Memahami** tugas dan fungsi tetapi **tidak memahami** ukuran keberhasilan pekerjaan
- C **Tidak memahami** tugas dan fungsi serta **tidak memahami** ukuran keberhasilan pekerjaan

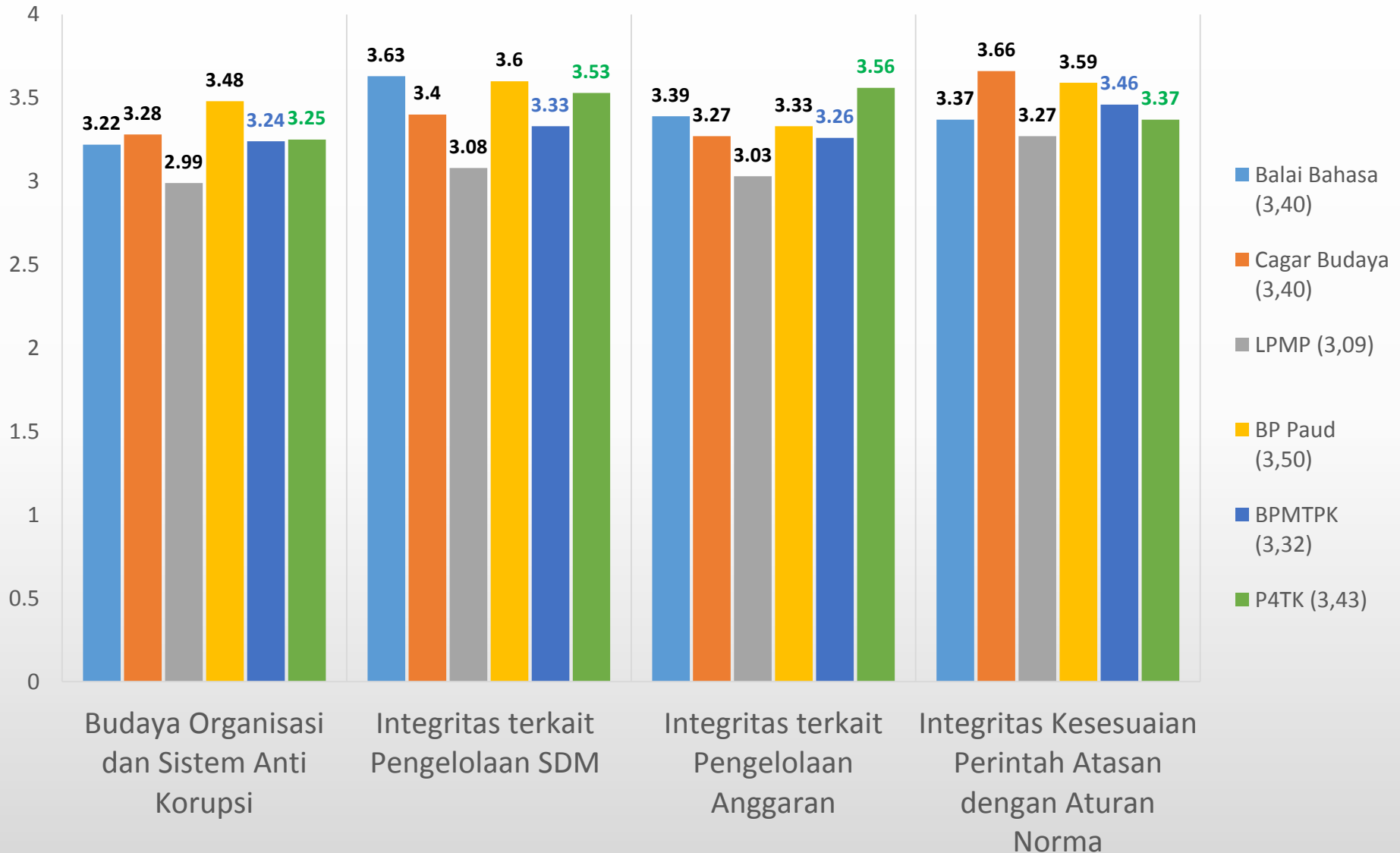
Survei Integritas Organisasi

Jumlah Rata-Rata tahun 2016 : 3,60

Jumlah Rata-Rata tahun 2017 : 3,32



Survei Integritas Organisasi



Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	AREA PERUBAHAN	Bobot	NILAI 2016	Nilai Sementara 2017
	KOMPONEN PENGUNGKIT (KP)	60,00	42,09	42,19
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	5,00	3,89	3,79
2	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5,00	3,13	3,13
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	6,00	3,84	3,18
4	PENATAAN TATALAKSANA	5,00	3,76	3,13
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	15,00	12,05	12,26
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	6,00	4,32	3,12
7	PENGUATAN PENGAWASAN	12,00	7,42	9,53
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6,00	3,68	4,06
	KOMPONEN HASIL (KH)	40,00	31,89	31,44
1	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	14,00	10,28	10,60
2	SURVEI INTERNAL INTEGRITAS ORGANISASI	6,00	5,40	4,71
3	SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI	7,00	5,71	5,71*
4	OPINI BPK	3,00	3,00	3,00
5	SURVEI EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK	10,00	7,43	7,43*
	TOTAL	100	73,91	73,63

*) Sedang proses penilaian

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	AREA PERUBAHAN	Bobot	Pusat	Balai Bahasa	Cagar Budaya	LPMP	BP PAUD	BPMPK	P4TK
	KOMPONEN PENGUNGKIT (KP)	60,00							
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	5,00	4,00	3,64	3,76	3,56	3,76	3,78	3,97
2	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5,00	3,13	-	-	-	-	-	-
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	6,00	3,18	-	-	-	-	-	-
4	PENATAAN TATALAKSANA	5,00	3,76	3,06	3,08	3,02	3,12	3,12	3,16
5	PENATAAN SISTEM MANAJ. SDM	15,00	12,51	12,24	12,21	12,26	12,26	12,22	12,18
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	6,00	4,35	2,90	2,80	2,88	3,02	2,96	2,98
7	PENGUATAN PENGAWASAN	12,00	9,61	9,52	9,50	9,48	9,52	9,54	9,54
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6,00	3,54	3,88	3,92	4,18	4,38	4,28	4,24

Evaluasi Zona Integritas

No	Nama Unit	Manajemen Perubahan	Penataan Tatalaksana	Penataan Manajemen SDM	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Total Pengungkit
		Skala 0-5	Skala 0-5	Skala 0-15	Skala 0-6	Skala 0-12	Skala 0-6	60
1	P4TK Bid. Otomotif & Elektronika	4,26	4,25	8,01	8,70	10,10	8,22	43,54
2	PPAUD Jawa Barat	4,26	4,34	7,75	8,70	10,01	8,22	43,27
3	P4TK Pertanian	2,83	3,84	8,23	8,70	11,68	7,57	42,85
4	P4TK Penjas BK	4,02	4,25	7,79	8,70	9,73	7,97	42,46
5	P4TK Bid. Bangunan & Listrik	4,09	4,09	7,62	8,70	9,81	7,74	42,04
6	Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	4,48	4,33	7,67	8,70	7,37	7,37	42,03
7	PPAUD Jawa Timur	4,23	3,92	8,01	8,70	8,35	8,34	41,53
8	LPMP Jawa Tengah	4,09	4,09	9,50	7,37	10,41	6,04	41,49
9	Balai Bahasa Jawa Barat	4,34	4,25	7,67	8,70	7,72	7,72	41,21
10	P4TK Matematika	4,02	4,02	8,17	8,70	8,55	6,85	40,55
11	P4TK Bid. Mesin & Teknik Industri	3,55	4,08	7,28	8,70	9,43	7,45	40,49
12	LPMP Jawa Barat	3,92	4,34	8,79	7,26	10,12	5,59	40,01
13	BPPAUD Sumatera Utara	4,09	3,59	7,63	8,34	10,03	6,20	39,88
14	Museum Vredeburg	4,26	4,25	7,45	8,21	6,09	6,09	39,05
15	BPNB Bali	4,26	3,84	7,67	8,46	5,64	5,64	38,66
16	PPAUD Jawa Tengah	3,39	3,42	7,73	8,46	8,31	4,97	36,28
17	LPMP Babel	4,01	3,92	8,39	7,37	5,88	5,59	35,16
18	Puspendik	2,92	3,59	7,40	8,21	4,30	4,30	34,04
19	LPMP Kalimantan Timur	1,08	3,59	8,16	7,37	6,48	5,30	31,98

Catatan:

1. Terdapat 12 Satker dengan nilai diatas 40 (63,15%)
2. Terdapat 7 Satker dengan nilai dibawah 40 (46,84%)

Rekomendasi

1

PERENCANAAN

1. Rumusan kinerja tidak menggambarkan mandat
2. Ketidakselarasan perencanaan dengan Unit dan Satker
3. Tidak sinkron antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan



2

PENGUKURAN

1. Rumusan indikator kinerja tidak jelas
2. Belum bersifat *outcome*
3. Aplikasi pengukuran kinerja belum dimanfaatkan



3

PELAPORAN

1. Kurang penyajian informasi kinerja
2. Lebih bersifat formalitas
3. Tidak terdapat upaya perbaikan atas capaian kinerja



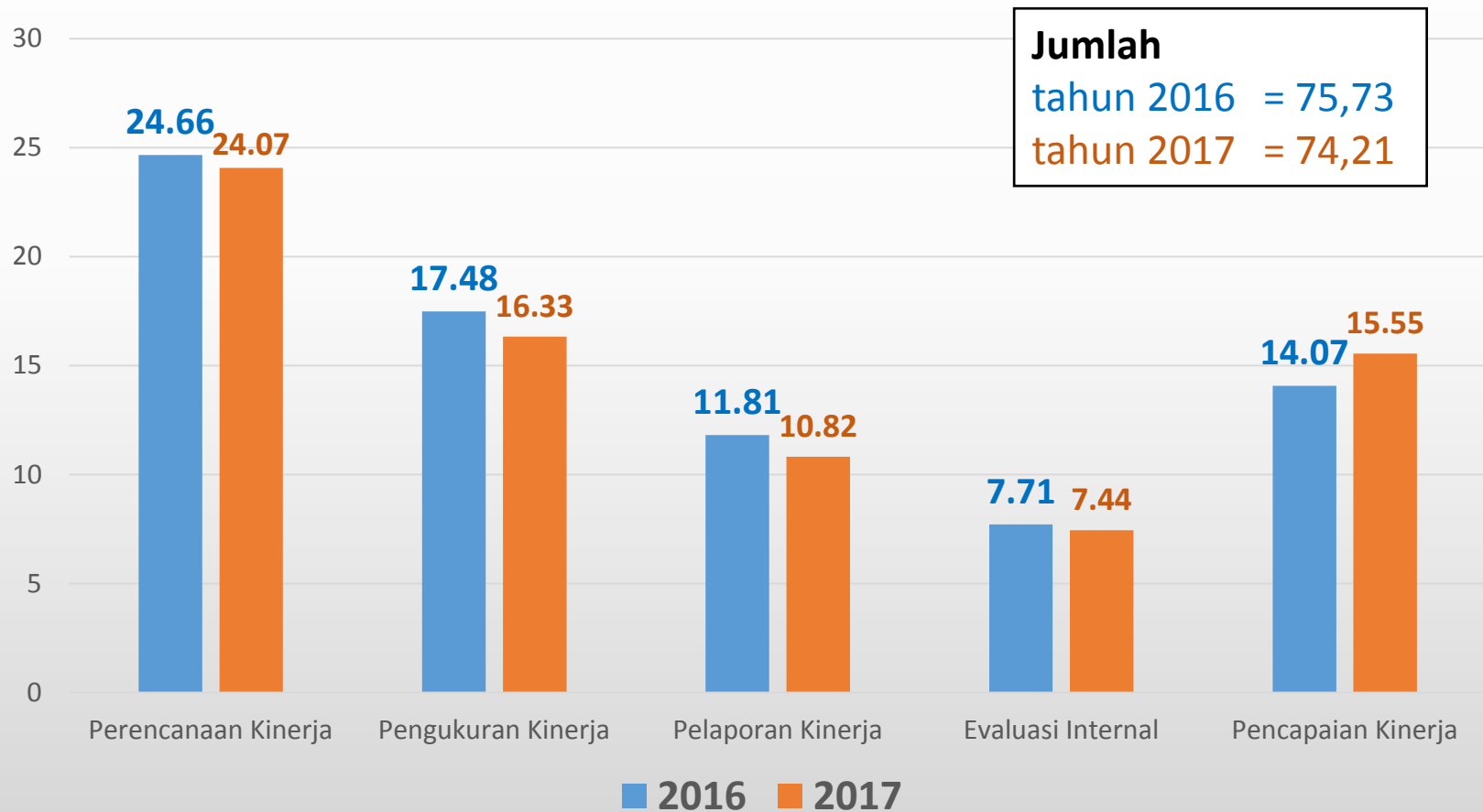
4

EVALUASI INTERNAL

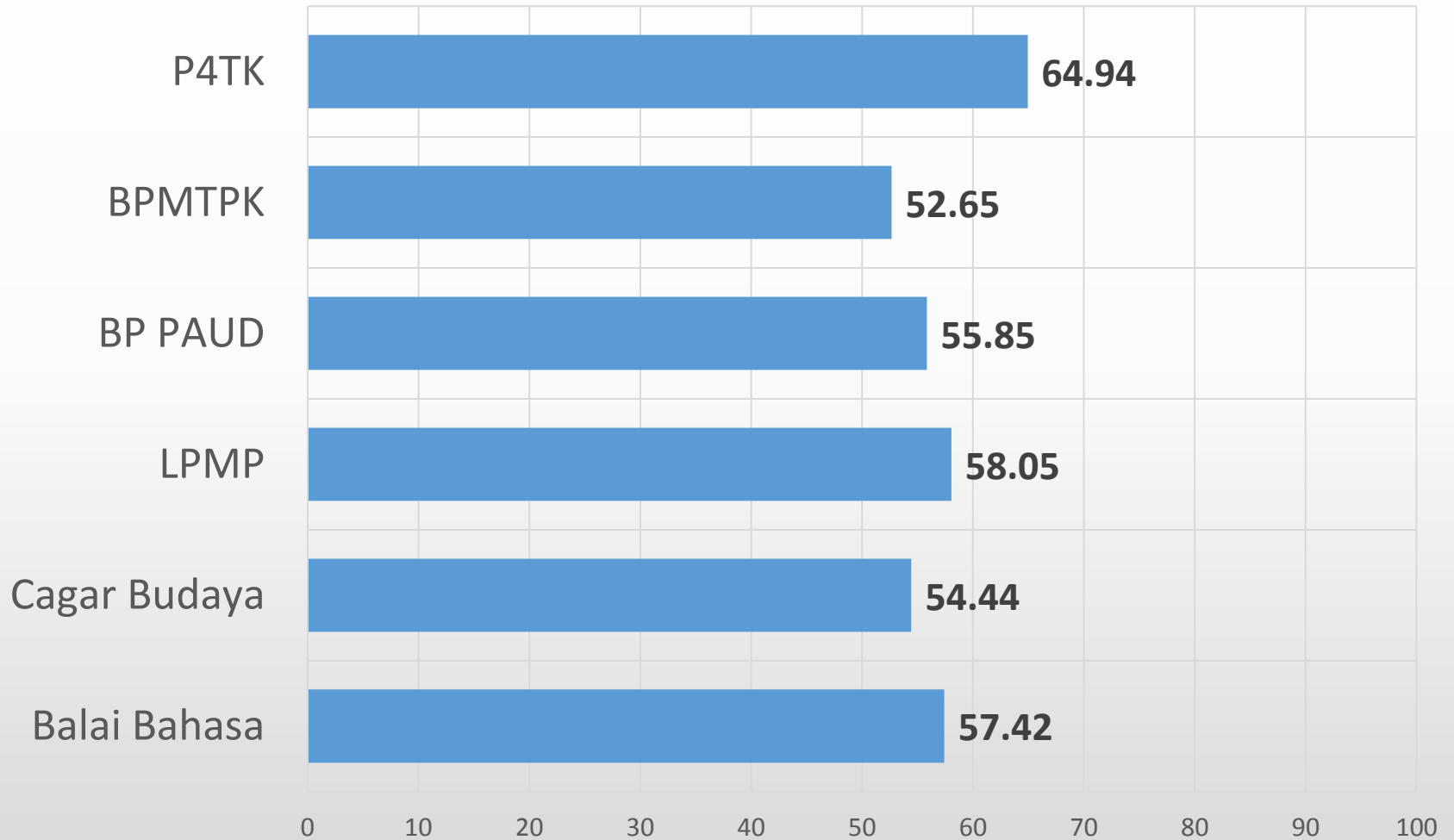
1. Bersifat formalitas
2. Belum mampu memicu perbaikan kinerja



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



EVALUASI SAKIP



Lima Langkah Strategis

- Peningkatan efektivitas Tim RBI

Seluruh Jajaran
Pimpinan

1

- Penerapan Manajemen Kinerja:
 - Perencanaan kinerja
 - Performance based organization
 - Evaluasi kinerja berkelanjutan

Peningkatan peran
Biro Perencanaan
dalam Penerapan
Manajemen Kinerja

2

Lima Langkah Strategis

- Manajemen SDM yang terintegrasi berbasis kompetensi dan kinerja:
 - Evaluasi kompetensi
 - Diklat berkelanjutan
 - Kinerja individu

Biro Kepegawaian
Seluruh Unit Kerja

3

- Penguatan pengawasan:
 - Early Warning System
 - Monitoring kinerja berkelanjutan

Inspektorat
Jenderal
Seluruh Unit Kerja

4

Lima Langkah Strategis

- Reviu dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan

Seluruh Unit Kerja Teknis

Biro Hukum dan Organisasi

5

Terima kasih